



# **MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS**

**'KONFERENSI NASIONAL  
PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'**

---

**OLEH BAMBANG SOESATYO  
KETUA DPR RI  
Selasa, 04 Desember 2018**







# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- Partai politik, menciptakan demokrasi. Partai politik memainkan peran signifikan dalam pelebagaan nilai-nilai dan mekanisme demokrasi. Demokrasi tidak akan bermakna apa-apa tanpa partai politik.
- Presiden pertama Republik Indonesia (Bung Karno) mengatakan “Partailah yang memegang obor, partailah yang berjalan di muka, partailah yang menyulahi jalan yang gelap dan penuh dengan ranjau-ranjau sehingga menjadi jalan terang.” Karenanya, kehadiran partai politik dalam sistem kehidupan politik modern yang demokratis menjadi suatu keharusan.





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- Partai politik juga disebut sebagai tulang punggung demokrasi. Ia menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya pemerintahan yang baik, yang dapat menyejahterakan rakyat. Hal tersebut setidaknya tercermin dalam lima fungsi partai politik.
- *Pertama*, partai politik sebagai wadah artikulasi, yaitu suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- *Kedua*, fungsi agregasi kepentingan, merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik.
- *Ketiga*, fungsi sosialisasi politik, yaitu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara.
- *Keempat*, fungsi rekrutmen politik, ialah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun publik.
- *Kelima*, fungsi komunikasi politik, ialah suatu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu gagasan politik.





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- Partai politik memiliki peran sangat *deterministic* dalam menentukan arah kebijakan negara, baik di legislatif (DPR/DPRD), eksekutif, bahkan di tingkat yudikatif. Sebagai konsekuensi logis dari peran strategis tersebut, maka penguatan peran partai politik oleh negara merupakan suatu keniscayaan.
- Saat ini sumber keuangan partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011.





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



## Tiga sumber keuangan partai politik:

- *Pertama*, dari iuran anggota partai politik bersangkutan.
- *Kedua*, sumbangan sah menurut hukum, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- *Ketiga*, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 pada 29 Maret 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui usulan Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menambah dana parpol yang bersumber dari APBN yang semula Rp108 naik hampir 10 kali lipat menjadi Rp1.000 per suara sah nasional yang didapat. Dengan meningkatkan anggaran partai politik (parpol), diharapkan bagi parpol melakukan pendidikan politik untuk rakyatnya.
- Namun, padatnya agenda politik setiap partai pada pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah, maka sumber-sumber keuangan tersebut tidak lagi mencukupi.
- Partai politik pun mengambil pula jalan lain, yang kerap kali menjurus pada tindak pidana korupsi.





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- Diterapkannya sistem kontestasi politik secara terbuka, menjadi sebab munculnya biaya politik tinggi. Beberapa usulan yang muncul, pemilu perlu dilakukan dengan sistem campuran (*mixedsystem*).
- Ada calon yang diusulkan parpol secara *list* tertutup dan ada calon yang dipilih secara terbuka berdasarkan suara terbanyak. Model ini dipakai Jerman dan Selandia Baru.
- Di Jerman, Bundestag (parlemen Jerman) beranggotakan 598 anggota parlemen. Setengahnya, 299 kursi, diisi oleh kandidat yang memenangkan suara terbanyak di 299 daerah pemilihan. Mereka adalah anggota parlemen yang dipilih secara langsung melalui suara pertama. Setengahnya lagi, juga 299 kursi, diisi oleh wakil-wakil partai sesuai dengan komposisi perolehan suara dalam pemilu,





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- Sistem ini tak jauh beda diterapkan di Selandia Baru. Di sana, setiap pemilih mendapat dua hak pilih. Satu hak pilih untuk pemilihan perwakilan dan hak pilih kedua untuk partai politik.
- Parlemen Selandia Baru mempunyai total 120 kursi dengan 71 kursi untuk perwakilan. 49 kursi sisanya merupakan kursi yang dialokasikan untuk masing-masing partai.
- Sistem campuran seperti yang diterapkan di Jerman dan Selandia Baru, boleh jadi bisa menjadi salah satu alternatif solusi guna meredam tingginya biaya dalam kontestasi politik.
- Pemilu, terutama pemilu legislatif, tidak lagi murni menggunakan sistem terbuka, tapi kombinasi antara sistem terbuka dan tertutup. Gabungan sistem terbuka dan tertutup ini, selain bisa menekan biaya politik tinggi, juga akan memperkuat kelembagaan partai politik.





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- Pemilihan kepala daerah (pilkada), baik pilkada kabupaten/kota maupun pilkada provinsi, perlu juga dilakukan pembenahan; tidak lagi murni menggunakan sistem terbuka.
- Sudah saatnya secara bertahap Pilkada dikembalikan ke DPRD, terutama untuk gubernur. Tentu hal ini harus melalui mekanisme kajian dan riset yang matang; berbasiskan data yang teruji (*testable*) dan terukur dengan tetap menghormati prinsip-prinsip luhur demokrasi.
- Wacana perubahan dari sistem pemilihan konvensional pencoblosan kertas suara juga perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk ditingkatkan menjadi sistem pemilu e-voting (*electronic voting*).
- Sistem ini sudah dicoba di 172 pemilihan kepala desa atau Pilkades di Kabupaten Pemalang, dan 14 Pilkades di Kabupaten Sidoarjo.





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- Partai politik harus memastikan para kadernya yang duduk di lembaga Legislatif, baik di DPR-RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota, mampu menjadi teladan ketaatan hukum bagi masyarakat. Terlebih lagi, DPR RI seharusnya menjadi etalase utama dari wajah partai politik yang ada di Indonesia.
- Perlu diingat bahwa Anggota Legislatif merupakan perpanjangan tangan partai politik di Parlemen. Baik-buruknya wajah partai politik sangat dipengaruhi Anggotanya di Parlemen.
- Jika Anggota Legislatif banyak terlibat korupsi, maka marwah, harkat, dan derajat partai politiknya niscaya akan turun di mata masyarakat.





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- DPR RI juga senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan dalam kinerjanya, agar dapat mendukung upaya integritas partai politik dan memberantas korupsi.
- DPR RI mengajak kerjasama dengan KPK untuk memberikan PEMBEKALAN ANTI KORUPSI kepada para Anggota DPR RI baru periode 2019-2024.
- Pembekalan ini sangat penting sebagai salah satu upaya meningkatkan pencegahan korupsi di tingkat Parlemen.
- Sebelum Anggota baru dilantik, pembekalan ini harus dilakukan agar mereka tidak terjerumus ke lembah korupsi, sehingga membuat wajah Parlemen akan menjadi lebih baik.





# MENDORONG WUJUDNYA PARPOL DAN SISTEM PEMILU BERINTEGRITAS

'KONFERENSI NASIONAL PEMBERANTASAN KORUPSI 2018'



- DPR RI mengajak KPK bekerja sama untuk memberikan *award* kepada partai politik yang Anggota Dewannya terhindar dari kasus korupsi.
- Pemberian penghargaan tersebut diharapkan memacu semangat partai politik untuk selalu mengawasi para kadernya di Parlemen agar tidak terjerumus dalam korupsi. Tentu saja kriteria yang disusun untuk pemberian penghargaan tersebut harus tepat.
- DPR RI akan mengajak KPK untuk bekerjasama melakukan penilaian secara terukur, terpadu, objektif, transparan dan akuntabel.
- Penghargaan yang diperoleh akan menjadi hal yang prestisius dan memberikan nilai lebih bagi partai politik tersebut di mata masyarakat Indonesia.





**SEKIAN,  
TERIMA KASIH**

